

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)**

Oleh:

**MUHAMMAD AFANDI
NPM. 1602040202**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MUHAMMAD AFANDI
NPM. 1602040202**

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Pembimbing II : Dharma Setyawan, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk dimunaqosyahkan**
Saudara Muhammad Afandi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : Muhammad Afandi
NPM : 160204002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN
BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Ganti Warno Pekalongan)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I,

Nawa Angkas, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (Studi
Kasus Desa Ganti Warno Pekalongan)

Nama : Muhammad Afandi
NPM : 160204002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing I,

Nawa Angkas, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setvawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimill (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 0348 / ln. 28. A / D / PP. 00.9 / 01 / 2021

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (studi kasus : desa gantiwarno pekalongan Lampung Rtimur), disusun oleh: Muhammad Afandi, NPM 1602040202, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) pada hari/ tanggal: Kamis, 14 Januari 2021.

TIM PENGUJI :

Ketua : H Nawa Angkasa SH MA

Penguji I : Liberty SE., MA

Penguji II : Dharma setyawan MA

Sekretaris : Aisyah Sunarwan M.pd



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (Studi Kasus: Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)

Oleh
MUHAMMAD AFANDI
NPM. 1602040202

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses, salah satunya pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri. Tujuan peneliti untuk mengetahui efektifitas program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari manajemen bisnis Islam di Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuannya agar dapat mendeskripsikan mengetahui efektifitas program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari manajemen bisnis Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pengurus BUMDes, Perangkat desa dan masyarakat Desa serta dokumentasi digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait Pemberdayaan BUMDes Rukun Sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno sebagai sarana atau unit usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan cukup baik namun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa. Dari beberapa unit usaha yang dikelola BUMDes belum bisa dikatakan efektif karena tujuan dari pendiri BUMDes belum tercapai. Sedangkan secara manajemen bisnis Islam BUMDes Rukun Sejahtera sudah sesuai dalam menjalankan kegiatan BUMDes.

Kata kunci: Efektivitas, BUMDes, Pemberdayaan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AFANDI

NPM : 1602040202

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



Muhammad Afandi
NPM. 1602040202

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 162

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta Ibu suswaningsih dan Bapak Hamba Nuryanto yang penuh kasih sayang, perhatian, kesabaran dan yang tak pernah lelah mendo'akan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk keberhasilananak-anaknya.
2. Kakak dan Adikku, Shela Fahmaturahmah dan Raihan Trio Asyafei yang senantiasa memberikan semangat, senyum, dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. H.Nawa Angkasa, SH, MA, sebagai Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikana bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Perangkat Desa Dan pengurus BUMDes Rukun Sejahtera desa Gantiwarno, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021
Peneliti,



Muhammad Afandi
NPM. 1602040202

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Efektifitas	10
1. Pengertian Efektifitas	10
2. Indikator Efektifitas.....	11
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	13
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)	15
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	15
2. Jenis Usaha BUMDes	16
3. Tujuan Pendirian Bumdes	17
4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	22
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	26
3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	27
4. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	29

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	31
6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	33
7. Peningkatan Ekonomi.....	34
8. Desa	38
D. Manajemen Bisnis Islam	42
1. Manajemen	42
2. Bisnis Islam	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B. Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah Singkat Desa Gantiwarno.....	53
2. Kondisi Geografis	53
3. Kondisi Demografis	54
4. Keadaan Penduduk	55
5. Keadaan Sosial Ekonomi	56
B. Analisis Konsep Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Desa yang Dilakukan Oleh BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno	57
C. Analisis efektivitas program rukun sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa gantiwarno Ditinjau dari Bisnis Islam	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Kepengurusan BUMDes Rukun Sejahtera	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.¹

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

¹ <https://jdih.bpk.go.id/?p=20949>.diunduh pada 11 Maret 2020 pukul 12.30

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis *system* kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan *miniature* dan *sample* yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

Dengan berdirinya BUMDes di setiap desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan dapat memberdayakan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat pun juga meningkat dengan seperti itu desa bisa menjadi mandiri dan sejahtera demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. sebagaimana adanya ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat.²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97)³

Saat ini sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes.⁴ di lampung timur telah terbentuk 242 BUMDesa dari 264 desa yang ada⁵. Namun dalam realitanya masih banyak BUMDes yang mengalami permasalahan dalam perkembangannya. Oleh sebab itu perlu adanya strategi yang digunakan oleh setiap BUMDes agar kegiatan

² Satika Rani, “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan), skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, 36

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 222

⁴ <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes?page=home>. diakses pada 9 Juli 2020, pukul 06.00

⁵ <http://datin.kemendesa.go.id/>, Diakses pada 16 Februari 2020, pukul 12.15.

operasional dapat berjalan dan dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDes secara efektif.

Namun Membangun ekonomi produktif melalui BUMDesa pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Desa belum menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDesa yang efektif. Kinerja BUMDesa di Kabupaten lampung Timur masih rendah. Penyebabnya adalah ketidak mampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat BUMDes yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengawasan BUMDesa. Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDesa disebabkan oleh adanya dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDesa.⁶

Gantiwarno adalah salah satu desa di Kecamatan pekalongan. Desa tersebut terbentuk pada tahun 1939. Gantiwarno terdiri dari 7 Kadus. Sebagian besar Matapencarian penduduk sebagai petani, buruh tani serta pedagang. BUMDesa yang menjadi harapan pemerintah desa untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa tersebut terbentuk pada tahun 2016. Dengan di buatkan Perdes Gantiwarno tentang BUMDesa rukun sejahtera dengan Nomor 1 Tahun 2016 serta disahkan di notaris tanggal 24 Mei 2016 Nomor 61 serta didaftarkan di

⁶ Denok Kurniasih. "Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Banyumas". Jurnal Administrasi Publik Dan Politik Edisi Vol. I No. 3 (2015), 1

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 26 Mei 2016. BUMDesa Rukun Sejahtera memiliki unit usaha yaitu penyewaan alat pesta (tarub, panggung, kursi, sarung kursi,) dan pengelolaan tempat parkir SMP.⁷

BUMDes Rukun Sejahtera sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun belakangan tetapi masih terlihat blom adanya program yang menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat meberdayakan ekonomi masyarakat di desa Gantiwarno, seperti yang di katakan oleh saudara tisnak:

“BUMDes memang sangat di andalkan dalam meningkatkan PAD Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat, namun selama 4 tahun ini memang belum ada progres yang signifikan yang mampu dilakukan BUMDes Rukun Sejahtera untuk membantu meningkatkan PAD Desa gantiwarno dan ekonomi masyarakat”⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih tema **“Efektivitas Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus: Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)”**. Alasan peneliti tertarik meneliti objek dengan berbagai macam program yang telah dijalankan BUMDes Rukun Sejahtera namun blom terlihat meningkatnya ekonomi bagi masyarakat.

⁷ Bayu, ketua BUMDes Rukun Sejahtera, 2020, efektivitas Program Bumdes Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Gantiwarno.wawancara pada 20 September 2020

⁸ Tisnak, sekretaris Desa Gantiwarno, wawancara pada 25 September 2020 pukul 20.00

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa yang dilakukan oleh BUMDesa Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno?
2. Bagaimanakah efektivitas program Rukun sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gantiwarno ditinjau dari bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui konsep program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa yang dilakukan oleh BUMDesa Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Rukun sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gantiwarno ditinjau dari bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah yang terdapat pada BUMDesa Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno.

b. Praktis

Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi BUMDesa Rukun Sejahtera khususnya dan pembaca ataupun masyarakat pada umumnya tentang bagaimana keefektifitasan pengelolaan BUMDesa secara optimal dan proposional sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi karya Singgih Tri Atmojo yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi) pada tahun 2015.⁹ Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang peranan-peranan pemberdayaan yang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya yaitu memberi pinjaman modal usaha oleh BUMDesa Al-Madina.

⁹ Singgih Tri Atmojo, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi". Skripsi, Jember: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember, 2015.

Persamaan penelitian ini melakukan pemberdayaan pada masyarakat desa sekitar. Perbedaan penelitian ini Mengevaluasi sejauh mana peran BUMDES, sehingga dapat menyimpulkan dampak yang diberikan oleh BUMDesa dalam memberdayakan masyarakat sekitar sedangkan pada penelitian ini menitik beratkan pada keefektivitasan berjalannya program-program BUMDesa yang ada sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitar secara optimal.

2. Salman Fathoni, skripsi yng berjudul Penentuan Priortas Proyek Menggunakan *Fuzzy Analytic Network Proses* (Studi Kasus BUMDes Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten) pada tahun 2017.¹⁰ Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa dengan menggunakan Fuzzy Analytic Network Proses diharapkan dapat menentukan pengelolaan proyek yang berpotensi besar oleh BUMDesa Kemudo sehingga dapat dikembangkan yang nantinya dapat memberikan dampak yang positif untuk masyarakat desa Kemudo.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengelola potensi desa melalui BUMDES. Perbedaan penelitian ini pengelolaan BUMDesa pada penelitian tersebut yaitu menentukan strategi menggunakan metode *Fuzzy Analytic Network Proses* guna mengetahui langkah yang tepat dalam memilih strategi untuk mengetahui prioritas apa yang paling potensial untuk dikembangkan. nantinya sedangkan pada penelitian ini meneliti bagaimanakah pengelolaan BUMDES dikelola secara maksimal

¹⁰ Salman Fathoni, "Penentuan Prioritas Proyek Menggunakan Metode Fuzzy Analytic Network Proses (Studi Kasus di BUMDes Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)", Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2017.

sehingga tercapainya efektivitas kinerja BUMDesa yang pada akhirnya memberikan dampak yang baik dalam pemberdayaan masyarakat sekitar

3. Yuli widyastuti, skripsi yang berjudul peran badan usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus pujokerto kecamatan Trimurjo kabupaten lampung tengah persepektif ekonomi Islam studi kasus (kecamatan Trimurjo kabupaten lampung tengah) pada tahun 2017.¹¹ Skripsi ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang peranan badan usaha milik desa (BUMDES Sejahtera) untuk mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDES di daerah lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi di BUMDES sejahtera blom dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan BUMDES. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut mengkaji tentang BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Islam. sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan BUMDES terhadap ekonomi masyarakat.

¹¹ Yuli Widyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah" Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Lampung, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai.

Drucker, sebagaimana dikutip oleh Asfi dan Wijaya mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the raight things*), sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Dari kedua definisi yang dikemukakan oleh Drucker tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi. Menurut Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).¹

Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Nasila, memberikan pengertian bahwa efektifitas adalah ukuran suatu organisasi dimana kemampuan organisasi untuk mencapai segala Keperluannya.²

¹ Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya, Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang, Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2 2015, 256

² Jans Wilianto Nasila, "Efektifitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat, Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu", Jurnal Academica Fisip Untad Vol. 05 No. 02 Oktober 2013, 1258

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut. Keefektivan organisasi adalah kondisi yang menunjukn sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai.

2. Indikator Efektifitas

Adapun menurut Makmur indikator efektifitas adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

c. Ketepatan dalam menentukan

Menentukan usaha yang tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang ada serta apa yang dibutuhkan merupakan indikator yang dapat di pertimbangkan sehingga kecil kemungkinan untuk usaha yang dijalankan tidak maksimal.

d. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.³

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Richard M Streers, terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap

³Gary Jonathan Mingkid1 Daud Liando Dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, hal.4

yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik Pekerjaan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan

lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.⁴

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. Desa dalam pembangunan memiliki BUMDes yang diharapkan menjadi roda ekonomi mandiri desa.⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.

⁴ Mujahid Anshori, “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik”, (Lombok Tengah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 13-14

⁵ Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No. 2 Desember 2016, 194

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan.⁶

2. Jenis Usaha BUMDes

Jenis Usaha BUMDes di antaranya sebagai berikut:

- a. Usaha sosial adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengahrapkan keuntungan finansial. contoh lumbung pangan.
- b. Usaha penyewaan, penyewaaan barang yang bersifat melayani masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh PAD. Contoh: penyewaan tarup, penyewaan mesin bajak
- c. Usaha dagang atau produksi, BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. contoh: BUMDes membuat pertamini.
- d. Usaha perantara, disini BUMDes dapat menjadi perantara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani ke pasar.

⁶ Dinas Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Universitas Brawijaya: 2007), 4

- e. Usaha Bersama, BUMDes dijadikan sebagai unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. contoh: BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.
- f. Kontraktor, BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan proyek desa
- g. Keuangan (Banking).⁷

3. Tujuan Pendirian Bumdes

BUMdes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa.⁸ Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta

⁷ Abdul Rahman, dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6

⁸ P.L. Rika Fatimah, "Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur", Volume 7 Nomor 2 Tahun 2018, 126

kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.⁹

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable..* Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha penyewaan, penyewaan yang berupa kebutuhan masyarakat.¹⁰
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;

⁹ Coristya Berlian Ramadan, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, 1073

¹⁰ Abdul Rahman, dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa.*, 4

- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- b. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah:

- a. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama;
- b. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat;
- c. Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal;
- d. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha;

- e. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;
- f. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan
- g. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.¹¹

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.¹²

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama

¹¹ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)", Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, VOL 13 No.1 Maret 2016, 69

¹² Mujiyono, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung", (Semarang: Universitas Negeri Semarang (2017).8-9

oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka

akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.¹³

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa istilah pemberdayaan berasal dari akar kata "daya", yang berarti tenaga atau kekuatan. Kata asal itu diberi awalan "ber" sehingga berbunyi "berdaya" yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Kemudian kata berdaya diberi awal "pe" dan akhiran "an" menjadi "pemberdayaan" yang mempunyai arti menjadikan mampu untuk melakukan sesuatu. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁴

Pemberdayaan berasal dari kata daya atau *power*. Pemikiran modern tentang *power* muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo

¹³ Dinas Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES.*, 13

¹⁴ Muhammad Afifulloh, "Pemberdayaan Masyarakat Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari", (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). Diunduh pada tanggal 20 juli 20, Pukul 21.49 WIB.

Machiavelli dalam *The Prince*, diawal abad ke-6, dan Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad ke-17.Representasi adanya *power* tampak pada posisi, pengambilan keputusan, dan pengaruh. Dengan *power* yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan.¹⁵

Semangat demokrasi yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 yakni pada pasal 200 sampai 216, dengan dikembalikannya status desa kepada masyarakat adat, tidak lagi diatur dalam uniformisasi, hingga masyarakat desa selaku masyarakat adat berhak membangun dirinya sendiri, menyelesaikan persoalan mereka sendiri yang bukan mustahil akan berbeda antara satu desa dengan desa lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Hadirnya kebijakan Otonomi Desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa Otonom untuk dapat membiayai Pembangunan di Desanya secara mandiri. Hal tersebut berartibahwa Pemerintah Desa harus dapat menggali sendiri sumber-

¹⁵Siti Aminah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 2

sumber pendapatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur oleh Undang-undang. Artinya Pemerintah Desa harus lebih mandiri dan tidak lagi terlalu tergantung pada Pemerintah daerah dan Pusat. Maka dari itu pemerintah desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat guna mengali potensi desa.¹⁶

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Disini, masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri.¹⁷

Menurut Ginanjar pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁸

Dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. gerakan itu dimaksud sebagai upaya menggerakkan sebuah

¹⁶ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013, 11

¹⁷ Totok Mardikonto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 61

¹⁸ Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145

masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan insentif, tidak tersentralisir dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan kecukupan.¹⁹

Pemberdayaan juga mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir.²⁰

Kemandirian desa, khususnya dalam bidang ekonomi perlu cenderung untuk di kembangkan. Sebab sumberdaya alam Indonesia berawal dari desa. Apabila desa menjadi mandiri dalam mengurus kebutuhannya maka tidak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa mandiri.²¹

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh di atas, maka yang di maksud pemberdayaan masyarakat adalah sebuah inisiatif yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadikan suatu masyarakat agar lebih mandiri untuk melaksanakan gagasan atau tugas yang di kerjakan dengan mandiri

¹⁹ Ivanovich Agusta dan Fujiartanto, *Indeks Kemandirian Desa*, (Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2014), 22

²⁰ Sri Handini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 9

²¹ Nikmatul Masruroh dan Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 3

supaya masyarakat dapat menjadi lebih baik. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat yang lemah untuk bisa menjadi kuat, yang pasif menjadi aktif, dan yang tidak produktif untuk bisa menjadi produktif. Maka dapat ditarik dua point pemberdayaan masyarakat pada dasarnya terdapat dua unsur yaitu kuat dan lemah. Yang kuat memberikan kekuatan kepada yang lemah untuk tujuan sama-sama kuat dan bisa berdiri sendiri. Pemberian kekuatan bisa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, motivasi maupun bentuk asli kekuatan itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Telah dikemukakan bahwa: pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). terkait pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²²

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu dengan dengan meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan

²² Totok Mardikonto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat.*, 105-112

atau peningkatan kemampuan²³. Peningkatan kemampuan tersebut merupakan tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam tulisan Suryadi bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang atau kelompok masyarakat, melalui penguatan kemampuan belajar sepanjang hayat (*life long learning*) sebagai proses yang dapat memutakhirkan pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan lainnya yang berguna bagi kehidupan.²⁴

3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.²⁵ Masyarakat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang memang hidup secara nyata berkekurangan, setelah berusaha secara maksimal memperoleh penghasilan, namun penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.

Mereka yang sebenarnya mempunyai kesempatan dalam melakukan upaya untuk memperoleh rezeki, namun dalam menjalani pekerjaan atau usahanya seringkali banyak mengeluh ketika penghasilan yang diperolehnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya. Mereka adalah masyarakat miskin yang kurang berpartisipasi

²³ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 43

²⁴ Mustangin, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, 67

²⁵ Kesi Widjiyanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal "Ekonomi Pembangunan"*, No. 01 (2015) 16.

secara aktif dalam menggali potensi mereka sendiri dan lingkungan sekitar guna keluar dari lingkaran kemiskinan karena timbulnya pemberdayaan karena adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat tidak tahu dan tak mau tahu. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rad ayat 11:

لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".²⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami umat manusia tetap diperintahkan untuk berdaya dan berusaha tanpa berpangku tangan dari orang lain, meskipun berhasil tidaknya adalah kehendak Allah. Allah telah memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan nasib manusia sendiridimasa depan. Karena sebenarnya manusia sendiri-lah yang paling bertanggung jawab atas hidup dan nasibnya, bukan karena faktor lingkungan, keadaan, kondisi ekonomi, orang lain, orang tua, saudara, takdir, nasib dan lain sebagainya.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 337.

4. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan.²⁷ Adapun metode yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat, adalah:

- a. SL (Sekolah Lapang)/FFS (*Farmers Field School*), merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar-bersama, SL/FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.
- b. FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok yang Terarah. Pada awalnya, FGD digunakan sebagai teknik wawancara pada penelitian kualitatif yang berupa “*in depth interview*” kepada sekelompok informan secara terfokus. FGD nampaknya semakin banyak diterapkan dalam kegiatan perencanaan dan atau evaluasi program. Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang yang tidak saling

²⁷Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal.197.

mengenal) yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya. Sejalan dengan itu, pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber.

- c. RRA (*Rapid Rural Appraisal*), merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktiknya kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat.
- d. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa secara Partisipatif. PRA merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua *stakeholders* (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur.
- e. PLA (*Participatory Learning And Action*) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “learning by doing” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar

(melalui: ceramah, curah-pendapat, diskusi, dll.), tentang sesuatu topik seperti: persemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.²⁸

Hal yang juga harus diperhatikan dalam pemilihan metode pemberdayaan masyarakat adalah, bahwa program pemberdayaan masyarakat harus lebih banyak mengacu kepada pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi, dibanding dengan upaya menambah pengalaman belajar, baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan-keterampilan baru.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita (1996) dalam Zubaedi (2013) mengemukakan bahwa pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) arah tahapan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang (*enabling*). Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan, diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat.

²⁸ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 199-204.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu membuat masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban.
- c. Melindungi masyarakat (*protection*). Artinya dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya upaya langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktik eksploitasi oleh kaum/pihak yang kuat terhadap kaum/pihak yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah.²⁹

Pada tahap *Enabling*, memberikan kapasitas atau transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Biasanya pada tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya. Pada tahap *Empowerment*, target diberikan daya,

²⁹Abdul Rahman Rahim *et al.*, “Strategi Implementasi Model Pengembangan Wirausahawan Muda Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar”, Jurnal “Balance” Volume XVI, Nomor 2 (2017): 4.

kekuasaan, otoritas atau peluang dimana mereka diberi kesempatan untuk mencoba berdiri sendiri tanpa tanpa dituntun, sehingga masyarakat dapat berdaya.

Masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi melalui tiga aras,³⁰ yaitu:

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aproach*).

³⁰Satya Prihantoro, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)", Jurnal "NFECE" Volume 2, Nomor 2 (2013): 5.

- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

7. Peningkatan Ekonomi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata peningkatan bermakna proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha.³¹ Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat.³²

Dilihat dari kata bahasa tersebut dapat dipahami bahwa kata peningkatan merupakan kata kerja yang bermakna suatu usaha, proses, cara untuk meningkatkan sesuatu agar lebih baik. Peningkatan dimaksudkan pada makna yang berhubungan dengan proses kemajuan.

³¹ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet Ke-3, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1620

³² M Paramita, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal", dalam *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Bogor: Universitas Djuanda Bogor, 2018), Volume 4. No. 1, April 2018, 19

Sedangkan ekonomi telah dijelaskan di atas bahwa ekonomi diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan ekonomi adalah suatu proses dalam meningkatkan suatu usaha guna memenuhi kebutuhan hidup melalui suatu bentuk sistem pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber produksi yang berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menurut Mubyarto, dalam dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan harus didasarkan pada 4 konsep dasar yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Pengembangan permodalan.
- c. Pengembangan peluang kerja dan berusaha.
- d. Penguatan kelembagaan usaha bersama.³³

Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa cara atau strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Salah satunya yaitu melalui kegiatan produksi. Mengingat kegiatan produksi sebagai salah satu proses atau cara yang

³³ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 136

dapat mengembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam usahanya meningkatkan perekonomian mereka secara mandiri.

Adapun langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi.
- b. Melakukan program pembinaan yang berkelanjutan.
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi.³⁴

Dalam peningkatan ekonomi selalu ada kaitannya dengan pendapatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).³⁵ Sadono Sukirno mendefinisikan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.³⁶

Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan lain dari suatu asset suatu entitas atau pelunasan utang-utangnya (atau kombinasi dari keduanya) yang dihasilkan dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktifitas-aktifitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral yang berkelanjutan dari entitas tersebut.³⁷

Kontribusi pendapatan dari suatu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi

³⁴Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), 14

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.

³⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47

³⁷ Stice James D, dkk. *Akuntansi Intermedite*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 10, 493

yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Setidaknya ada tiga jenis Pendapatan dalam Keluarga, yaitu:

a. Pendapatan Aktif

Pendapatan Aktif atau *earning income* adalah pendapatan yang dihasilkan karena bekerja secara aktif. Contoh: pendapatan seorang karyawan atau seorang pemilik usaha.

b. Pendapatan Portofolio

Pendapatan Portofolio akan didapatkan jika berinvestasi pada produk-produk keuangan, misalnya: Reksadana, Obligasi atau saham.

c. Pendapatan Pasif

Pendapatan pasif adalah pendapatan yang dihasilkan sebuah sistem yang bekerja menghasilkan uang. Misal: Royalti dari menulis buku, rekaman.³⁸

Macam-macam pendapatan ditinjau dari bentuknya ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang biasanya diterima sebagai balas jasa prestasi sumber-sumber utamanya yaitu gaji atau upah.

b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang bersifat reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang.

³⁸ Richard G Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 70

- c. Pendapatan selain penerimaan uang dan barang adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistribusi dan biasanya membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitas yang dijalankan. Pendapatan juga merupakan salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengelola industri mikro. Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Pendapatan selain penerimaan uang dan barang adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistribusi.

8. Desa

a. Pengertian Desa

Desa menurut PPNo 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: “desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

³⁹ *Ibid.*, 74

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan salah satunya adalah dengan mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk dikelola menjadi BUMDesa.⁴⁰

Desa Gantiwarno mengalokasikan sebagian dana guna mengelola BUMDesa yaitu dengan menyewakan alat pesta berupa sewa tarup dan kursi.

b. Karakteristik dan Ciri Desa

Kehidupan masyarakat desa dicirikan dengan karakteristik di antaranya:

- 1) Peranan kelompok primer sangat besar
- 2) Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- 3) Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- 4) Struktur masyarakat bersifat homogen
- 5) Tingkat mobilitas rendah

⁴⁰ Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 42

- 6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- 7) Proporsi jumlah anak dalam struktur kependudukan cukup besar

Adapun ciri-ciri dari desa sebagai berikut:

- 1) Desa dan masyarakat desa erat sekali hubungannya dengan alam.
- 2) Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial, dengan jumlah penduduk yang tidak besar serta sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.
- 3) Ikatan yang kuat antara penduduk serta kontrol penduduk penduduk di desa lebih ditentukan oleh adat, moral dan hukum informal⁴¹

c. Pemerintahan Desa

Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: “Pemerintahan Desa adalah pe-nyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut

⁴¹ Gunawan Priyatno dan Aries Subagiyo, *Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif Dan Berkelanjutan*, (Malang: UB Pres, 2018), 7-8

dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”⁴²

d. Faktor yang Menyebabkan Ekonomi Masyarakat Desa Mundur

Faktor yang menyebabkan ekonomi masyarakat desa mundur di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak tersedianya ruang pengetahuan berbasis desa. Anak-anak muda adalah masa depan desa. Dari mereka estafet kepemimpinan di bangun. Pengetahuan desa harus diberikan melalui sistem desa . bukan hanya sebatas pengetahuan agama berbasis rumah ibadah, tetapi juga pengetahuan melalui kelas-kelas kreatif desa. Misal mendatangkan pemateri bicara soal pertanian, teknologi, media digital.
- b. Problem desa yaitu budaya tradisional yang mulai ditinggalkan. Ekonomi desa merupakan ekonomi rakyat perekonomian desa berjalan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar rumah.
- c. Perputaran uang desa . desa akan sejahtera apabila uang yang ada di desa berputar di desa tidak dibiarkan keluar begitu saja. Misal konsumsi barang dari luar dll. Menahan perputaran uang di desa selama-lamanya adalah cara desa tidak kehilangan arus ekonomi.⁴³

⁴² Coristya Berlian Ramadana, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 1072

⁴³ Dharma Setyawan dan Dwi Nugroho, *Pemberdayaan Ekonomi Desa*, (Metro: Saiwawai Publishing, 2020), 38-39

D. Manajemen Bisnis Islam

1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pembahasan kita akan dimulai dengan definisi yang lebih kompleks dan mencakup aspek-aspek penting pengelolaan, seperti yang dikemukakan oleh Stoner sebagai berikut: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al Quran sebagai dasar pengelolaan unsur- unsur manajemen agar dapat

menggapai target yang ditujui, yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen umum adalah konsep Ilahiyah dalam implementasi sangat berperan.⁴⁴

Konsep ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dari konsep ekonomi umumnya yaitu dari sisi metodologi, aksiologis, dan juga ontologisnya. Konsep ini terkait dengan manajemen syariah merupakan salah satu bidang ilmu tergabung pada satu rumpun ilmu ekonomi Islam. Dari sudut metodologi, konsep ekonomi Islam memiliki prinsip nilai yang bisa dikaji secara dinamis. Secara aksiologis, memiliki tujuan dan arah, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Sementara dari tinjauan ontologisnya, sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan luhur. Dalam konsep Islam, antara pemilik modal dan pekerja diberi penghargaan proporsional atas prestasi kerja sehingga ada kesejajaran. Keberhasilan seseorang dinilai bukan dari dirinya sendiri, melainkan banyak faktor. "Itu semuanya beranjak dari konsep Islam yang memandang manusia secara integral, yaitu secara material, spiritual, sosial, dan lainnya.

Ilmu Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi”.

⁴⁴ Aun Falestien Faletehan, Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Perkuliahan Program S-1 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014, hal.14

Dari definisi tersebut menjadikan Manajemen Syariah menjadi suatu bidang ilmu yang sangat bermanfaat dalam setiap kalangan dalam mengorganisasikan segala sumber daya yang ada dimiliki yang didasari adanya kerjasama diantara berbagai unsur-unsur organisasi dalam mencapai visi misi organisasi tersebut.

b. Asas-asas manajemen

Dalam hal asas-asas ini Alquran memberikan dasar sebagai berikut:

1) Beriman

Diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berarti:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ ...

Artinya: “Janganlah orang-orang mengambil (memilih) orang-orang kafir menjadi wali (Pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, lepaslah ia dari pertolongan Allah”.

2) Bertaqwa

Diterangkan dalam surat An-Naba’: 31 yang berarti:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, mendapat kemenangan.”

3) Azas Keseimbangan dan Keadilan

Menurut Nuruddin Keadilan dan Keseimbangan adalah suatu konsep yang luas berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan sosial, politik terutama ekonomi. Dalam Alquran kata adil disebut sebanyak tiga puluh satu kali. Belum lagi kata-kata yang semakna seperti *al-Qisth*, *al-Wazn* (Seimbang) dan *al-Wasth* (Moderat).

4) Musyawarah

Diterangkan dalam surat As-Syura: 38 yang berarti:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Pengangkatan pihak ketiga sebagai mediator dapat dilakukan secara formal maupun

nonformal. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa disebut arbitrase. Dalam hukum syariah, istilah arbitrase lebih dikenal dalam sebutan *tahkîm*. Istilah *tahkîm* sendiri berasal dari kata “*hakkama*” yang secara harfiah berarti mengangkat (seseorang) menjadi wasit. Sedangkan secara terminologi, tahkim dapat diartikan sebagai pengangkatan seseorang menjadi wasit dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa.

Dengan kata lain, pengertian tahkim ialah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Karena tahkim merupakan aktivitas penunjukan wasit, maka orang yang ditunjuk itu disebut hakam.⁴⁵

2. Bisnis Islam

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melampirkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.

⁴⁵ Sunarji Harahap, Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen at -*Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017: 211-234, 214-216

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيَهُ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*

Disamping untuk mencari rezeki Islam sangat menekankan sangat (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaanya atau pengelolaan dan pembelanjaan.

Dari paparan di atas bisnis Islam dapat disimpulkan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas pemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk provitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendaayagunaan hartanya (ada aturan halal haram).⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres 2002), 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian Lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹ Dapat dikatakan bahwa jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survey. Penelitian ini dilakukan kepada pengurus BUMDes, perangkat Desa dan masyarakat desa di Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat sifat populasi atau daerah tertentu.² Sehingga sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif di mana peneliti melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta memberikan gambaran secara terperinci tentang tentang efektif atau belumnya program yang dijalankan BUMDes Rukun Sejahtera.

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), 32

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 47

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh langsung dari survey lapangan.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *snowball* sampling. Teknik *snowball* sampling adalah penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil menjadi membesar seperti bola salju yang menggelinding yang lama lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat memberikatan data yang lebih lengkap. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.⁴

Dalam penelitian ini sumber primer didapatkan langsung dari proses wawancara kepada pengurus BUMdes, wawancara kepada masyarakat desa dan wawancara kepada aparatur desa untuk mengetahui efektifitas BUMdes yang selama ini sudah berjalan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

⁴ *Ibid.*, 123

lewat dokumen.⁵ Sumber data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan telah dirumuskan dengan cermat⁷ sehingga peneliti dapat memperoleh data secara tepat dan pasti sesuai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada pengurus BUMdes, masyarakat desa dan kepada aparatur desa untuk mengetahui efektifitas BUMdes yang selama ini sudah berjalan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 384

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 233

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.⁸

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi yang didapat dari wawancara kepada pengurus BUMdes di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan, wawancara masyarakat desa dan

⁸ *Ibid.*, 240

⁹ *Ibid.*, 244

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42

wawancara kepada aparatur desa untuk mengetahui efektivitas program bumdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Perkembangan BUMDes Rukun Sejahtera

a. Organisasi

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Gantiwarno telah membuat peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Gantiwarno.

2. Tujuan Pembentukan BUMDes Rukun Sejahtera

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Gantiwarno dalam rangka meningkatkan kemajuan Pemerintah Gantiwarno dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan masyarakat
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Gantiwarno untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Gantiwarno secara keseluruhan dalam rangka pengentasan

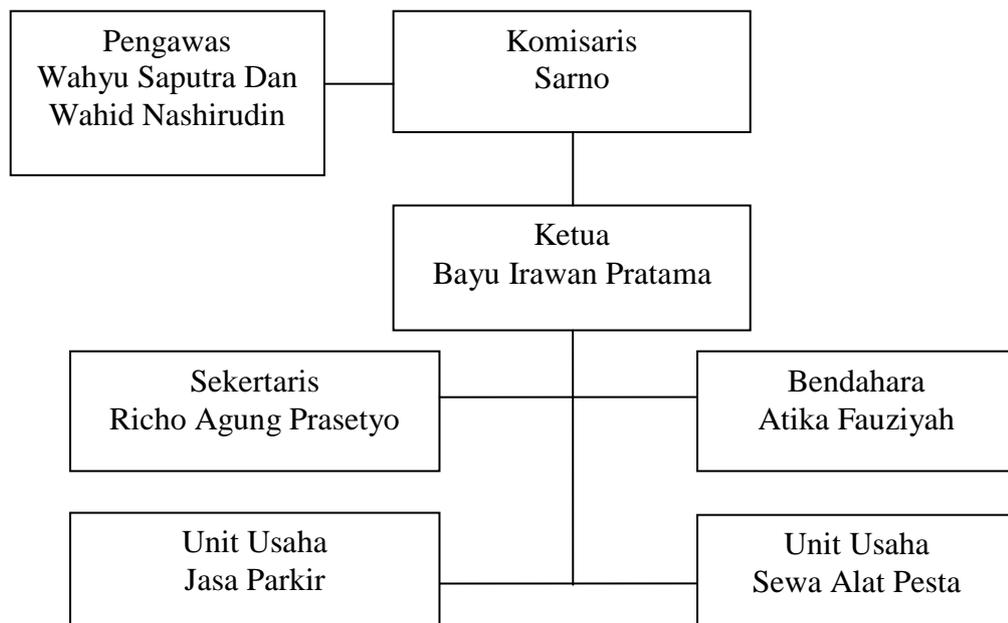
kemiskinan.

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes.
- d. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
- e. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.

3. Struktur Kepengurusan BUMDes Rukun Sejahtera

Adapun struktur kepengurusan BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan BUMDes Rukun Sejahtera



Visi dan misi BUMDes Rukun Sejahtera

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa

- b. Menciptakan kesempatan berusaha.
- c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam Menanggulangi kemiskinan.
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.
- f. Memberikan kesempatan usaha, dan Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

Adapun kriteria untuk menjadi anggota BUMDes Rukun Sejahtera:

- a. Warga desa yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat
- b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun.
- c. Berkepribadian baik jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.

4. Modal BUMDes Rukun Sejahtera

Permodalan BUMDes diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
- b. Pemerintah Desa
- c. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

Dalam membangun sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka Pemerintah Desa Gantiwarno mengalokasikan modal awal kepada BUMDes Rukun Sejahtera sebesar Rp. 15. 000. 000 yang kemudian

digunakan sebagai modal BUMDes untuk menjalankan usaha yang dikelolanya.

5. Pembagian Laba Usaha BUMDes

Pembagian Laba Usaha BUMDes Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang termaktub dalam AD/ART BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.

Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDes setiap tahunnya:

- a. PAD (Pendapatan Asli Desa) : 30 %
- b. Pengurus, kepala unit, pengawas dan karyawan : 30 %
- c. Operasional BUMDes : 20 %
- d. Cadangan pemeliharaan : 20 %

Persentase pembagian laba usaha sudah dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini didasarkan pada azas kemandirian

dan kemanfaatan. Saat ini laba yang di hasilkan BUMDes Rukun Sejahtera dikelola untuk pengembangan unit usaha.

6. Unit Usaha

a. Penyewaan alat pesta

Ada beberapa barang yang di sewakan oleh BUMDes Rukun Sejahtera di antaranya yaitu terop, kursi dan panggung . Usaha yang di kelola oleh BUMDes ini menyediakan 6 unit tenda tarop, dan kursi 100 unit serta panggng 2 unit, ketiga barang inilah yang di sediakan oleh BUMDes untuk di sewakan bagi masyarakat. Dalam setahun tercatat penyewaan tenda tarop bisa mencapai 15 sampai 20 kali.

b. Usaha jasa parkir sekolah

Dalam rangka memfasilitasi siswa siswi SMP N 1 Pekalongan BUMDes Rukun Sejahtera menghadirkan tempat parkir guna penitipan montor. Dengan menyediakan 12 plong tempat parkir yang mampu menampung sekitar 300 kendaraan motor. Dalam sehari siswa siswi yang menitipkan kendaraan motor mencapai 200. namun usaha jasa parkir ini baru berjalan 3 bulan dan harus berhenti dikarenakan adanya pandemi covid-19. ¹

B. Analisis Konsep Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Desa yang Dilakukan Oleh Bumdes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah inisiatif yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadikan suatu masyarakat agar lebih mandiri

¹ Bayu, ketua BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gnatiwarno Pekalongan, wawancara pada hari Senin 23 November 2020 Pukul

untuk melaksanakan gagasan atau tugas yang dikerjakan dengan mandiri supaya masyarakat dapat menjadi lebih baik. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat yang lemah untuk bisa menjadi kuat, yang pasif menjadi aktif dan yang tidak produktif menjadi produktif.

Adapun pemberdayaan yang ada di desa Gantiwarno:

1. Program PKK

Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. PKK di desa Gantiwarno dijalankan dengan memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa Gantiwarno dengan konsep pemberdayaan dibidang sosial dan kewirusahaan, kegiatan pemberdayaan ini dilakukan menggunakan anggaran dana desa.

Adapun bidang pemberdayaan yang dilakukan PKK dalam bidang sosial yaitu mensosialisasikan pentingnya tanaman obat (TOGA) di lingkungan rumah, mensosialisasikan prilaku hidup bersih, serta mensosialisasikan maanfaat ber-KB.

Dalam bidang kewirausahaan ibu-ibu PKK desa Gantiwarno mengadakan pelatihan membuat kripik dan cara pengemasannya. Namun pemberdayaan dalam bidang ini belum berjalan lancar, hanya sebatas pada pelatihan saja.

2. Gabungan kelompok Tani (GAPOTAN)

Gapotan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sedangkan kelompok tani adalah kumpulan para petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dan lingkungan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha.

Konsep Pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapotan Desa Gantiwarno adalah menyesuaikan kebutuhan petani yang ada di desa. Dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani yang ada di desa Gantiwarno dalam pengelolaan lahan pertanian serta solusi hama agar tercapainya panen yang maksimal.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan dalam meningkatkan hasil panen dan ekonomi masyarakat yaitu dengan menghubungkan kelompok tani dengan dinas terkait untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan masyarakat seperti bajak, traktor dan alat pemanen padi. Serta penyediaan pupuk bersubsidi, bibit bersubsidi, pestisida dll. seperti yang dikatakan oleh saudara sugeng:²

“Kami kelompok tani menampung aspirasi dari kelompok tani untuk diusulkan kepada dinas pertanian serta memberikan penyuluhan tentang mengatasi hama baru dan inovasi pengolahan lahan yang baru.”

3. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek)

²Sugeng ketua Gabungan kelompok tani Desa Gantiwarno, wawancara, pada 26 November 2020 pukul 20.00

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Desa adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi, dan orientasi tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Program Posyantekdes ini termasuk program pemberdayaan yang baru dibentuk tahun 2020 dan diketuai oleh saudara dini. Kegiatan yang pernah di laksanakan Posyantekdes yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bisa menggunakan teknologi terbaru di era yang sekarang ini guna memahamkan kepada masyarakat bahwasanya sangat penting untuk bisa menggunakan teknologi.

Posyantekdes akan mengadakan pemenuhan fasilitas teknologi yang dibutuhkan masyarakat sesuai potensi desa dengan menganggarkannya di dalam anggaran dana desa. Seperti yang dikatakan oleh saudara Dini:³

“Kegiatan Posyantekdes di tahun 2020 sudah di anggarkan tinggal merealisasikan ke program-program yang akan di musyawahkan, kemungkinan anggaran tahun ini untuk pengadaan fasilitas.”

³ Dini, ketua Posyantekdes desa Gantiwarno, wawancara, pada hari selasa 24 november 2020 pukul 18.30

4. Rumah Desa Sehat (RDS)

Rumah desa sehat adalah salah satu program pemberdayaan yang ada di desa Gantiwarno. RDS adalah wadah untuk pegiat pemberdayaan dibidang kesehatan. Dalam kegiatannya melakukan pemberdayaan terhadap kader posyandu, guru paud dan semua pihak yang terkait dengan kesehatan.

Dalam hal memberdayakan masyarakat RDS berfungsi sebagai tempat informasi, edukasi, pengembangan kader dan advokasi terkait pembangunan kesehatan desa.

Adapun Kegiatan-kegiatan RDS Gantiwarno yaitu membuat program pusat pembelajaran masyarakat di bidang kesehatan yang di gunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan diantara lain, memberikan pelatihan kepada ibu-ibu terkait mengasuh anak-anak, mensosialisasikan peningnya gizi bagi anak dll.

RDS dalam menjalankan program-programnya sudah sangat baik dan setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang telah di anggarkan oleh desa. Seperti yang telah di katakan oleh saudari esti:⁴

“RDS sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk ibu dan anak-anak, karna kesehatan masyarakat sangatlah penting. Terutama pada anak yang merupakan para penerus generasi, maka program-program RDS ini selalu kami usahakan semaksimal mungkin.””

⁴ Esti, ketua Rumah Desa Sehat(RDS) desa Gantiwarno, wawancara, pada hari senin 23 november 2020 pukul 18.30

5. Karang Taruna (KARTUR)

Karang taruna adalah wadah bagi pemuda untuk mengeluarkan berbagai gagasan dan ide dengan tujuan memberikan ruang untuk pemuda agar segala ide dan gagasan dapat terealisasi. Dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya karang taruna pemuda mempunyai wadah untuk menyalurkan ide-ide yang positif.

Desa Gantiwarno mempunyai karang taruna dengan nama tunas karya bakti. Karang taruna tunas karya bakti mulai dirintis tahun 2019 dan membentuk kepengurusan pada tahun 2020, namun sebelum terbentuk kepengurusan karang taruna sudah banyak melakukan pemberdayaan terhadap pemuda. Salah satunya menggerakkan pemuda untuk bergotong royong dalam kegiatan 17 Agustus ataupun dalam memperingati hari ulang tahun desa Gantiwarno.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan kartur tunas karya bakti meliputi dua bentuk pemberdayaan yaitu pada bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi kartur memperdayakan pemuda untuk membuat usaha angkringan yang di jalankan setiap malam minggu di lapangan desa Gantiwarno dan pengolahan lahan pertanian. Sedangkan dalam sosial kartur tunas karya bakti mengumpulkan dana untuk di berikan sumbangan kepada veteran dan masih banyak lagi program yang berjalan. Kegiatan karang taruna tunas karya bakti sampai saat ini tidak menggunakan dana anggaran desa Gantiwarno.

6. BUMDes Rukun Sejahtera

BUMDes adalah wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Gantiwarno. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki BUMDes juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Keberadaan BUMDes di Desa Gantiwarno diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan BUMDes dapat tercapai.

BUMDes Rukun Sejahtera sudah beroperasi selama 4 tahun dan memiliki beberapa unit usaha, yaitu unit usaha alat pesta dan tempat parkir. Dalam melaksanakan kegiatannya BUMDes memberdayakan masyarakat terutama untuk pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan. Adapun unit usaha BUMDes Rukun Sejahtera

a. Unit Usaha Penyewaan Alat Pesta

Dalam menjalankan usahanya BUMDes Rukun Sejahtera memberdayakan pemuda yang belum mempunyai pekerjaan untuk di berdayakan dalam menjalankan bisnis penyewaan alat pesta Yang sebelumnya sudah di berikan pelatihan.

Adapun yang di sewakan antara lain: tarub, kursi, panggung dan sarung kursi. diantaranya mempunyai 10 unit tarub, 100 unit kursi, 2 unit panggung dan 100 sarung kursi. Untuk satu unit tarub sewanya

60, 000 ribu / hari, untuk kursi satu unit 2000 ribu/perhari, untuk panggung satu unit 200, 000 ribu/ hari, untuk sarung kursi satu unit 1000 ribu/hari. Dikatakan oleh saudara Bayu bahwa: ⁵

“Usaha ini cukup baik untuk dijalankan dengan melihat dari sisi kebutuhan masyarakat akan alat pesta, namun dengan terbatasnya modal dalam upaya melengkapi peralatan membuat masyarakat kurang tertarik untuk menyewa alat pesta yang disediakan BUMDes”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa BUMDes Rukun Sejahtera pada Unit usaha penyewaan alat pesta sudah berjalan namun belum maksimal. Dalam satu tahun alat pesta yg disewakan baik tarub, kursi, panggung maupun sarung kursi sebanyak 20 kali.

b. Unit Usaha Parkir Sekolah

Unit usaha jasa parkir termasuk program BUMDes yang baru karena program ini baru berjalan di awal tahun 2020. Dalam usaha ini BUMDes Rukun Sejahtera memperdayakan masyarakat sekitar dan juga pemuda yang belum mempunyai pekerjaan sehingga dengan adanya program ini di harapkan mampu meningkatkan ekonomi.

Usaha ini dibentuk karena melihat kebutuhan akan siswa siswi SMP N 1 Pekalongan yang membawa motor namun hanya dititipkan dirumah warga sehingga pengurus BUMDes rukun sejahtera

⁵ Bayu ketua BUMDes Rukun Sejahtera, *Wawancara*, pada minggu 10 November 2010 pada pukul 20.00

mempunyai inisiatif untuk membuat tempat parkir di balai desa yang atasnya di kasih baja ringan agar nyaman dijadikan tempat parkir yang kebetulan balai desa dan SMP bersebelahan Seperti yang dikatakan oleh saudara dimas:

“Sekarang untuk menitipkan montor sudah tidak bingung dan was-was yang biasanya hanya di titipkan di belakang rumah warga sekarang sudah disediakan di balai desa dekat dengan SMP N 1 Pekalongan”⁶

Siswa siswi yang menitipkan kendaraan dalam satu hari bisa mencapai 150 kendaraan dimana satu kendaraan dikenakan biaya 1000 /hari. Namun program jasa parkir ini harus berhenti sementara dikarenakan pandemi corona covid-19. Dikatakan oleh saudara Bayu:

“Unit usaha parkir sangat menjanjikan dengan omset di bulan januari sampai maret mencapai 5.000.000 namun dengan adanya pandemi ini sekolah diliburkan dan akhirnya tempat parkir tidak ada yang menitipkan kendaraan.”⁷

Pemilihan dan penentuan jenis usaha yang akan dijadikan unit bisnis BUMDes harus dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang matang. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di desa serta peluang pasar yang menjanjikan. Sehingga unit usaha yang

⁶ Dimas siswa SMP N 1 pekalongan, wawancara, pada senin 11 November 2020 pukul 17.00

⁷ Bayu ketua BUMDes Rukun Sejahtera, *Wawancara*, pada minggu 10 November 2010 pada pukul 20.00

dijalankan mampu memberikan keuntungan, nilai tambah ekonomi dan pasar dari bisnis tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya desa Gantiwarno sudah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program baik pemberdayaan yang tujuannya bersifat sosial, pembangunan masyarakat sehat dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Adapun pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik seperti rumah desa sehat (RDS), karang taruna dan Gapoktan dimana masing masing program pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Selain itu BUMDes dalam memberdayakan masyarakat juga sudah berjalan, dengan berbagai macam program yang dibuatnya namun masih banyak sekali kendala-kendala yang harus di evaluasi baik faktor internal maupun eksternal yang perlu diberikan solusi agar program-program yang dijalankan tetap bisa berjalan. Seperti halnya sekarang di masa pandemi semua program BUMDes Rukun Sejahtera berhenti.

Dilihat dari potensi dan pemberdayaan yang ada di Desa Gantiwarno, ada potensi besar yang belum di berdayakan dan di dorong potensinya oleh desa ataupun BUMDes yaitu dalam bidang pembibitan.yang mana pekalongan sebagai pusat bibit yang ada di lampung. Seharusnya desa mampu melihat itu sebagai peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan apresiasi berupa bantuan modal ataupun manajemen yang baik ataupun peatihan dalam digital marketing.

Seperti halnya di musim covid 19 seperti ini pembibitan tidak terlalu terimbas malah cenderung mengalami peningkatan pasar.

C. Analisis Efektivitas Program Bumdes Rukun Sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Gantiwarno Ditinjau Dari Bisnis Islam

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dan sasaran dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Adapun indikator efektivitas menurut Makmur yang dapat kita lihat sejauh mana usaha tersebut berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat:⁵⁹

1. Ketepatan waktu

Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan waktu

dalam memulai suatu unit usaha dengan mempertimbangkan musim dan kondisi masyarakat akan berdampak penuh dengan kesuksesan usaha yang akan dijalankan.

Ketepatan waktu akan berjalan lurus dengan usaha yang akan dijalankan, apabila kita dapat mencari kesempatan dalam sebuah peluang yang ada maka hasil yang akan didapatkan juga sesuai dengan harapan. Seperti dengan dimulainya oprasional unit usaha parkir memulai pembangunan di akhir Desember dan memulai oprasionalnya di awal januari bersamaan siswa siswi masuk sekolah.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas. Seperti dengan adanya dukungan dari Pemerintah Desa yang mengalokasikan dana yang besar untuk mewujudkan dan terlaksananya program BUMDes Rukun Sejahtera. Hal ini digambarkan dalam beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes yang penggunaan biayanya sesuai dengan kebutuhan. Seperti pembelian alat untuk menopang kelangsungan usaha BUMDes.

3. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan usaha yang tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang ada serta apa yang dibutuhkan merupakan indikator yang dapat dipertimbangkan sehingga kecil kemungkinan untuk usaha yang dijalankan tidak maksimal. Kelebihan dan potensi Desa Gantiwarno merupakan anugrah yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa untuk

memaksimalkan pendapatan Desa yang akan berdampak langsung kepada usaha yang dijalankan masyarakat sekitar.

Potensi yang ada di Desa Gantiwarno salah satunya masyarakat sering mengadakan hajatan namun di Desa Gantiwarno sudah ada yang mempunyai penyewaan alat pesta yang besar, sehingga pemilihan unit usaha BUMDes untuk penyewaan alat pesta tidak efektif. Kemudian untuk Jasa parkir sangat berpotensi dimana usaha berjalan sudah berjalan 4 bulan dan memberi masukan untuk masyarakat yang di berdayakan dan desa. namun di tengah pandemi covid-19 usaha ini harus berhenti sementara.

Namun sangat di sayangkan masih banyak potensi yang lebih besar namun belum mampu di kelola oleh BUMDes seperti halnya potensi desa Gantiwarno sebagai desa Pembibitan.

4. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan tersebut dapat dicapai. Penilaian indikator ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh BUMDes.

Hasil dari pengelolaan BUMDes Rukun Sejahtera belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Gantiwarno. Adapun program yang sudah bisa dirasakan seperti pada jenis usaha jasa parkir, walaupun usaha ini baru berjalan 3 bulan dan di haruskan berhenti karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan anak-anak sekolah harus melakukan belajar dari rumah.

5. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa di harapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam menjalankan BUMDes melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik aparat desa maupun masyarakat.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas organisasi sangat banyak di pengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah di pahami oleh bawahan. Ketua BUMDes dalam menjalankan organisasi ibarat sopir nya jadi mau dibawa kemana organisasi tersebut tergantung padanya. Adapun selama ini BUMDes yang di ketuai oleh saudara bayu sudah baik dalam memberikan koordinasi kepada anggota-anggota.

7. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditentukan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Dalam menentukan usaha BUMDes Rukun Sejahtera, musyawarah sangat di kedepankan salah satunya untuk melihat sasaran dari usaha yang akan di jalankan. untuk unit usaha alat pesta yang menjadi sasaran adalah

masyarakat desa kemudian untuk unit usah jasa parkir yang menjadi sasaran adalah siswa siswi SMP N 1 Pekalongan.

Dalam menjalankan program-program yang efektif diperlukan manajemen yang baik agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun asas-asas manajemen dalam Islam:

1. Beriman

Islam mengajarkan dalam menjalankan segala aktivitas baik ibadah maupun muamalah diwajibkan untuk beriman kepada allah swt dan mengedepankan orang Islam sebagai walinya. diterangkan dalam surat Ali Imran Ayat 28 yang berarti:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Barangsiapa berbuat demikian, lepaslah ia dari pertolongan Allah hal ini sesuai yang dikatakan oleh saudari atika fauziyah:

“Pengurus BUMDes Rukun Sejahtera dalam menentukan pemimpin mengedepankan seseorang yang mampu dan beragama Islam “⁸

⁸Atika Fauziyah Bendahara Bumdes Rukun Sejahtera, Wawancara, Pada Minggu 10 November 2010 Pada Pukul 20. 00

2. Bertaqwa

Dalam menjalankan aktivitas muslim dituntut agar selalu taat kepada Allah SWT dengan menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahnya. Dalam surah An-Naba ayat 31 menjelaskan:

﴿٣١﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Artinya: *sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, mendapat kemenangan”*

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Atika Fauziyah:

“saya kurang paham apakah dalam pengelolaan BUMDes ini semua sudah bertaqwa namun kami usahakan tidak menyebrang dari yang dilarang agama.⁹

3. Azas keseimbangan dan keadilan

Menurut nurdin keadilan dan keseimbangan adalah suatu konsep yang sangat luas berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan sosial, terutama ekonomi. Kata adil dalam al-quran disebut sebanyak tiga puluh kali.¹⁰

Unit usaha BUMDes ini mengutamakan keadilan sebagaimana dalam pembayaran parkir anak sekolah yang dulu dititipkan dimasyarakat mereka dikenai biaya 2000 namun di BUMDes hanya 1000 agar tidak membebani anak-anak sekolah. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Atika Fauziyah:

⁹ Atika Fauziyah Bendahara Bumdes Rukun Sejahtera, *Wawancara*, Pada Minggu 10 November 2010 Pada Pukul 20. 00

¹⁰ Sumarji Harahap, Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen At-Tawasuth, Vol. 2 No. . 1, 2017: 211-234, 214-216

“kami dalam menjalankan dan menentukan program kami selalu pertimbangkan agar tidak ada yang dirugikan antara BUMDes dan masyarakat agar program bisa diterima di masyarakat dan dapat berjalan dengan baik”¹¹

4. Azas musyawarah

Untuk menyelesaikan perkara atau perelisihan secara damai diperlukan musyawarah agar bisa menemukan titik tengah yang bisa disepakati oleh semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam menjalankan suatu organisasi sangat penting mengedepan musyawarah sebagai langkah awal dalam memutuskan program atau permasalahan yang ada. diterangkan dalam surat As Syura 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima(mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”*

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara bayu: “Kami dalam menentukan program dan menyelesaikan permasalahan BUMDes Sangat Mengedepankan Musyawarah terutama dalam menentukan program agar

¹¹Atika Fauziyah Bendahara Bumdes Rukun Sejahtera, *Wawancara*, Pada sabtu 9 November 2010 Pada Pukul 20. 00

dapat anggota-anggota yang lain juga ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga program yang ditentukan bisa semakin baik.”¹²

Berdasarkan uraian di atas, BUMDES Rukun Sejahtera dalam menjalankan program unit usahanya sudah berjalan dengan baik namun ada hal yang kurang efektif, adapun dikatakan tidak efektif dimana ada unit usaha yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pemilihan program yang tidak tepat dan adanya kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi proses pengelolaan program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

¹² Bayu ketua Bumdes Rukun Sejahtera, *Wawancara*, Pada Selasa 12 November 2010 Pada Pukul 20.00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari manajemen bisnis Islam (Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan yang ada di desa Gantiwarno meliputi pemberdayaan terhadap ibu-ibu PKK, Gabungan kelompok Tani(GAPOKTAN), pos pelayanan teknologi tepat guna desa(POSYANTEK), karang taruna (KARTUR), Dan BUMDes Rukun Sejahtera.

Dimana dalam melakukan pemberdayaan ada yang bersifat sosial dan pengembangan usaha /bisnis dalam hal ini program yang mengedepankan peningkatan ekonomi yaitu BUMDes dalam hal pemberdayaan masyarakat BUMDes melakukan pelatihan-pelatihan pentingnya berwirausaha. Dan melakukan pengembangan usaha/bisnis BUMDes Rukun Sejahtera meliputi:

- a. Penyewaan Alat Pesta Meliputi: sewa tarup, sewa kursi, sewa sarung kursi dan sewa panggung hiburan.
- b. Jasa parkir sekolah menyediakan lahan balai desa yang di beri atap baja ringan sehingga montor-montor yang ditipkan tidak kehujanan.

Namun masih ada potensi besar yang belum di berdayakan oleh desa maupun BUMDes yaitu pembibitan. Dengan melihat potensi desa Gantiwarno sebagai desa pembibitan seharusnya desa ataupun BUMDes mampu ikut kontribusi dalam pengembangan pasar ataupun pelatihan untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

2. BUMDes Rukun Sejahtera dalam menjalankan program unit usahanya sudah berjalan dengan baik namun ada hal yang kurang efektif, adapun dikatakan tidak efektif dimana ada unit usaha yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pemilihan program yang tidak tepat dan adanya kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi proses pengelolaan program BUMDes sehingga dalam pemberdayaan juga kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah:

1. Untuk akademisi, penelitian ini di harapkan dapat di lanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat lebih optimal dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan luas terkhusus tentang efektivitas program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari manajemen bisnis Islam.
2. Untuk BUMDes Rukun Sejahtera, harus selalu memberikan kontrol terhadap unit usahanya agar tetap berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, meningkatkan planning, organizing, actuating, dan controlling agar semua unit usahanya dapat

berjalan sesuai dengan pemanfaatannya. Seperti dalam hal pendanaan, memilih unit usaha yang sekiranya diterima oleh masyarakat dan agar unit usaha yang sudah ada bisa berkembang. Serta bisa berkolaborasi dengan program pemberdayaan lain yang ada di desa Gantiwarno agar pemberdayaan lebih maksimal serta memilih program yang akan di buat sesuai dengan potensi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh Muhammad. “*Pemberdayaan Masyarakat Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari*”. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017
- Agunggunanto Yusuf Edy, dkk. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bumdes”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol 13 No.1 Maret 2016
- Agusta Ivanovich dan Fujiartanto. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2014
- Aminah Siti dan Farmayanti Narni. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan. Keunikan Agroekosistem. dan Daya Saing* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Anshori Mujahid. “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik”. Lombok Tengah. Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- Asfi Nuskhiya dan Wijaya Bina Holi. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2* 2015
- Atmojo Tri Singgih. “Peran Badan Usaha Milik Desa BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember, 2015.
- Aun Falestien Faletahan. Pengantar Ilmu Manajemen. Buku Perkuliahan Program S-1 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya 2014
- Aziz Letty Latifah Nyimas. “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 13 No. 2 Desember 2016.
- Bayu.ketua BUMDes Rukun Sejahtera.2020.efektifitas Program Bumdes Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Gantiwarno
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Surabaya: Karya Agung, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Dinas Pendidikan Nasional. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Universitas Brawijaya: 2007

- Faletehan Falestien Aun. Pengantar Ilmu Manajemen. Buku Perkuliahan Program S-1 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya
- Fathoni Salman. “Penentuan Prioritas Proyek Menggunakan Metode Fuzzy Analytic Network Procces Studi Kasus di BUMDes Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2017
- Fatimah Rika P.L.. “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa Q-Bumdes Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2018
- Ginjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996
- Handini Sri, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019
- Harahap Sunarji. Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi – Fungsi Manajemenat -*Tawassuth*. Vol. 2. No. 1, 2017: 211-234
- Kartika Ni Kadek Diah Candra. Ni Kadek Sinarwati. Made Arie Wahyuni. “Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A”. e-journal S1 ak volume 8 nomor 2
- Kartono Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006
- Kurniasih Denok. “Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Kabupaten Banyumas”. Jurnal Administrasi Publik Dan Politik Edisi Vol. I No.3 2015
- Lipsev Richard G. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1993
- M Paramita. “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”. dalam Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat. Bogor: Universitas Djuanda Bogor, 2018. Volume 4. No. 1. April 2018
- Mardikanto Totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Mardikonto Totok dan Soebianto Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Masruroh Nikmatul dan Agung Parmono. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018

- Mingkid Jonathan Gary. Liando Daud Dkk. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat. Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997
- Mujiyono. "Peran Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". Semarang: Universitas Negeri Semarang 2017
- Mustangin, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol. 2. No. 1. Desember 2017
- Nadir Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Politik Profetik. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013
- Nasila Wilianto Jans. "Efektifitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat. Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu". Jurnal Academica Fisip Untad VOL.05 No. 02 Oktober 2013
- Peraturan Desa Gantiwarno Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Lampung. Kabupaten Lampung Timur.
- Prihantoro Satya. "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo*". Jurnal "NFECE" Volume 2. Nomor 2 2013
- Rahim Rahman Abdul *et al.*. "*Strategi Implementasi Model Pengembangan Wirausahawan Muda Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar*". Jurnal "Balance" Volume XVI. Nomor 2 2017
- Rahman Abdul, dkk. *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Ramadan Berlian Coristya, dkk. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bumdes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa". Jurnal Administrasi Publik Jap. Vol. 1. No. 6. 1073
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Salim Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Cet Ke-3. Jakarta: Modern English Press, 1991
- Stice James D, dkk. *Akuntansi Intermedite*. Jakarta: Erlangga, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cet. ke-13 Bandung: Alfabeta, 2011

Widjiyanti Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat". dalam Jurnal "Ekonomi Pembangunan". No. 01 2015

Widyastuti Yuli. "Peran Badan Usaha Milik Desa BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah" Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Lampung, 2017

Wrihzatnolo Randy R. dan Dwidjowijoto Nugroho Riant. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007

Yusanto Ismail Muhammad Dan Karebet Muhammad Widjajakusuma. *Menggap Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Pres 2002

Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003

Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

<https://jdih.bpk.go.id/?p=20949>

<https://kemendesa.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2575/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
 2. Dharma Setyawan, M.A.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Afandi
NPM : 1602040202
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Efektivitas Program BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDES Gantiwarno)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelambagaan

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH

**EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)**

ALAT PENGUMPUL DATA(APD)

A. Wawancara Kepada Pengurus BUMDes Rukun Sejahtera

1. Kapan Bumdes Rukun Sejahtera mulai beroperasi
2. Apakah pengelolaan BUMDes ini sudah efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa Gantiwarno?
3. Apakah pengelolaan BUMDes ini sudah mencapai target yang diinkan?
4. Unit usaha BUMDes apa saja yang berjalan efektif dan tidak efektif samapai sekarang?
5. Dari mana sumber dana BUMDes?
6. Hasil atau keuntungan dari pengelolaan unit usaha BUMDes ini dikelola untuk apa?
7. Apakah pengelolaan BUMDes ini sudah menerapkan prinsip ekonomi islam?

B. Wawancara Dengan Perangkat Desa

1. Apa saja potensi desa yang terdapat di Desa Gantiwarno?
2. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Gantiwarno?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya BUMDes?
6. Apakah dengan adanya BUMDes dapat menambah pendapatan masyarakat di Desa Gantiwarno?
7. Hasil atau keuntungan dari pengelolaan unit usaha BUMDes ini dikelola untuk apa?

C. Wawancara Dengan Masyarakat Desa

1. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat atas terbentuknya BUMDes Rukun Sejahtera?
2. Apakah pengelolaan BUMDes ini sudah aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa Gantiwarno?
3. Unit usaha BUMDes apa saja yang berjalan efektif dan tidak efektif sampai sekarang?

Metro, oktober 2020

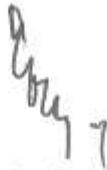
Peneliti



Muhammad Afandi

NPM.1602040202

Pembimbing 1



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP.19671025 200003 1 003

Pembimbing 2



Dharma Setyawan, MA

NIP.19880529 201503 1 005

OUTLINE

EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektifitas
 - 1. Pengertian Efektifitas
 - 2. Indikator Efektifitas
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
- B. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
 - 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
 - 2. Jenis Usaha BUMDes
 - 3. Tujuan Pendirian Bumdes
 - 4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
 - 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat
 - 4. Metode Pemberdayaan Masyarakat
 - 5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
 7. Peningkatan Ekonomi
 8. Desa
- D. Manajemen Bisnis Islam
1. Manajemen
 2. Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Singkat Desa Gantiwarno
 2. Kondisi Geografis
 3. Kondisi Demografis
 4. Keadaan Penduduk
 5. Keadaan Sosial Ekonomi
- B. Analisis Konsep Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Desa yang Dilakukan Oleh BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno
- C. Analisis efektivitas program rukun sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa gantiwarno Ditinjau dari Bisnis Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, oktober 2020

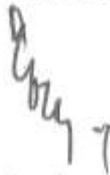
Peneliti



Muhammad Afandi

NPM.1602040202

Pembimbing 1



H.Nawa Angkasa,SH,MA

NIP.19671025 200003 1 003

Pembimbing 2



Dharma Setyawan,MA

NIP.19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2785/In.28/D.1/TL.00/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Gantiwarno
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2784/In.28/D.1/TL.01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD AFANDI**
NPM : 1602040202
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Gantiwarno, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Oktober 2020

Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2784/In.28/D.1/TL.01/10/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD AFANDI**
NPM : 1602040202
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Gantiwarno, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. IG Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakalmli (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Afandi** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040202 Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>ada skripsi dip di ipth</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

[Signature]
Muhammad Afandi
NPM. 1602040202



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Afandi Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 1602040202 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2020 /12		acc Bab IV-V Langsung pembimbing I	

Dosen Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Afandi
NPM. 1602040202

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Kepala Desa Gantiwarno



Foto 2. Wawancara dengan Kepala Sekretaris Desa Gantiwarno



Foto 3. Wawancara dengan Kepala BumDes Gantiwarno



Foto 3. Kantor Desa Gantiwarno



Foto 4. Parkiran (Unit Usaha) Milik BumDes Gantiwarno



Foto 5. Kursi-Kursi (Unit Usaha) Milik BumDes Gantiwarno



Foto 7. Tarub (Unit Usaha) Milik BumDes Gantiwarno

5.4.4	Belanja Perjalanan Dinas	170.000,00	170.000,00	0,00
5.4.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	150.000,00	150.000,00	0,00
5.4.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	20.000,00	20.000,00	0,00
5.4.5	Pembelian Barang Modal	22.870.000,00	22.870.000,00	0,00
5.4.5.1	Belanja Barang Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.4.5.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pkt	500.000,00	500.000,00	0,00
5.4.5.1.2	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00
5.4.5.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
5.4.5.2	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.4.5.2.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.4.5.3	Belanja Perjalanan Dinas	18.280.000,00	18.280.000,00	0,00
5.4.5.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.4.5.3.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
5.4.5.3.3	Belanja Kertas Perjalanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.4.6	Pelatihan/Pengabdian BHM Desa (Pelatihan yg dibayar)	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00
5.4.6.2	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
5.4.6.2.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
5.4.6.3	Belanja Perjalanan Dinas	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
5.4.6.3.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	330.000,00	330.000,00	0,00
5.4.6.3.3	Belanja Kertas Perjalanan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00

Foto 8. Anggaran desa untuk pemberdayaan BumDes Rukun Sejahtera(2019)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website. digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-981/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AFANDI
NPM : 1602040202
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602040202.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 08 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Afandi

NPM : 1602040202

Jurusan : S1 Ekonomi Syariah

Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI MANAJEMEN BISNIS
ISLAM (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Proposal Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 25%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Desember 2020
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, Muhammad Afandi. Dilahirkan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 3 Desember 1997. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Hamba Nuryanto dan Suswaningsih.

Riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh yaitu sebagai berikut:

1. SD N 1 GANTIWARNO lulus Pada tahun 2010
2. SMP N 1 PEKALONGAN lulus Pada Tahun 2013
3. MAN 1 LAMPUNG TIMUR lulus Pada Tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi di institut Agama islam Negri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi syariah. Pada akhir study, penelity mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Islam(Studi Kasus Desa Gantiwarrno Pekalongan Lampung Timur)**